

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hutang merupakan salah satu cara untuk memperoleh dana dari pihak eksternal (kreditur). Pengambilan keputusan pendanaan melalui hutang menjadi perhatian yang serius bagi pihak pengelola perusahaan, karena penggunaan hutang akan diikuti oleh resiko yang dihadapi. Namun, seringkali pihak manajer perusahaan mempunyai tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan utama tersebut, keputusan yang diambil manajer cenderung untuk melindungi dan memenuhi kepentingan mereka terlebih dahulu daripada memenuhi kepentingan pemilik. Salah satu alternatif manajer untuk memperoleh dana adalah dengan menaikan hutang. Akan tetapi, kebijakan hutang rentan terhadap konflik kepentingan.

Tinggi atau rendahnya tingkat hutang suatu perusahaan berkaitan dengan struktur modal yang mempunyai peran yang cukup penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Struktur modal merupakan perimbangan jumlah utang, saham preferen dan saham biasa, sehingga kebijakan struktur modal mempunyai peran yang cukup penting bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Srtuktur modal juga merupakan perimbangan antar modal asing dan modal sendiri. Modal asing adalah hutang baik jangka panjang maupun dalam jangka

pendek, sedangkan modal sendiri yaitu salah satunya berasal dari laba ditahan. Oleh karena itu, perusahaan harus cermat dalam menentukan struktur modal.

Kebijakan Hutang merupakan salah satu keputusan pendanaan yang sangat penting bagi perusahaan. Manajer selaku pengelola perusahaan harus memilih kombinasi sumber dana perusahaan dengan teliti karena setiap sumber dana memiliki konsekuensi finansial yang berbeda-beda, termasuk utang yang dirasakan lebih berisiko mengancam likuiditas perusahaan (Clarashinta, Dyah, 2014).

Menurut (Akbar, 2017) Kebijakan hutang diukur menggunakan *debt to total assets ratio* (DAR) digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan total hutang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi memberikan risiko yang besar namun apabila perusahaan mampu mengelola hutangnya dengan baik, maka penggunaan hutang akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham.

Menurut (Suryani & Khafid, 2015) Kebijakan hutang ialah kebijakan dengan menggunakan dana dari luar perusahaan. Kebijakan hutang yang tepat harus diperhatikan oleh manajer untuk memaksimalkan tujuan perusahaan, Manajer harus menentukan proporsi hutang yang tepat dengan memperhatikan

risiko dari hutang itu sendiri. Kebijakan hutang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan, Namun apabila terjadinya kebijakan yang fluktuatif yang malah mengakibatkan faktor-faktor yang mempengaruhinya menurun nilainya. Sehingga tidak sesuai dengan harapan bahwa kebijakan hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan. nilai perusahaan.

Dikutip dari laman Kontan.co.id, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) mengalami kerugian yang berturut-turut sejak tujuh tahun silam. Di tahun 2018 KRAS membukukan kerugian bersih US\$ 77,16 juta. Kerugian ini didorong oleh hutang jangka panjang dan jangka pendek. Di tahun 2018, pinjaman jangka pendek mencapai US\$ 1,13 miliar, dan pinjaman jangka panjang senilai US\$ 811,70 juta. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) KRAS yang diselenggarakan di Graha Cimb Niaga, Jumat (26/4), disetujui perusahaan akan melakukan transformasi bisnis dan keuangan perseroan serta anak perusahaan. Salah satu yang akan dilakukan oleh perusahaan adalah penerbitan saham baru yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk buy back divestasi kepemilikan saham perseroan pada anak perusahaan perseroan. Direktur Umum Krakatau Steel, Silmy Karim mengatakan, langkah ini diambil untuk memaksimalkan value atau nilai perusahaan terlebih dahulu. " Ada skema yang masuk convertible bond (obligasi konversi), lalu ada skema yang melalui divestasi, adapula yang sustain," terangnya kepada Kontan.co.id usai RUPS, Jumat (26/4).

Langkah restrukturisasi utang secara total ini seharusnya sudah diambil sejak dahulu. Waktu yang dibutuhkan memang akan lama dan melibatkan berbagai pihak seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank asing, maupun bank lokal. Diterangkan lebih lanjut oleh Silmy, kurang lebih US\$ 2,1 miliar hingga US\$ 2,2 miliar yang akan restrukturisasi. Sebesar US\$ 1 miliar akan masuk dalam skema convertible bond, sementara US\$ 1 miliar akan masuk skema divestasi. Untuk sustain sekitar US\$ 600 juta hingga US\$ 700 juta. Jangka waktu untuk divestasi selama 3 tahun, mulai dari 2019 hingga 2020. Waktu ini diperlukan supaya perusahaan bisa melakukan optimalisasi nilainya terlebih dahulu. Ketika ditanya mengenai anak perusahaan yang akan didivestasi, Silmy belum mau menjelaskan detailnya. "Masih kita kaji. Tidak bisa saya sebut, kasihan mereka (perusahaan) yang juga punya investor, punya partner," terang Silmy. Ia menambahkan ada klausul buy back dalam divestasi. Buy back rencananya akan menggunakan right issue, akan tetapi realisasinya masih setelah penerbitan convertible bond. Right issue juga akan digunakan untuk membayar convertible bond. Sementara itu, untuk convertible bond jangka waktunya 5 tahun hingga 10 tahun. Silmy mengungkapkan melalui langkah ini kinerja Perseroan tidak merasa terbebani. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) KRAS yang diselenggarakan di Graha Cimb Niaga, Jumat (26/4), disetujui perusahaan akan melakukan transformasi bisnis dan keuangan perseroan serta anak perusahaan.

Menurut (Sha, 2018) Tarif pajak merupakan suatu penetapan pajak yang dibuat pemerintah untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar dan di pungut oleh wajib pajak. Memilih pendanaan perusahaan melalui utang, bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman merupakan biaya yang dapat di kurangkan atas laba usaha. Pada umumnya tarif pajak di indonesia ditentukan berdasarkan persentase (%).

Menurut (Wahyuni et al., 2016) Pajak penghasilan badan usaha merupakan biaya bisnis yang utama bagi hampir kebanyakan perusahaan. Semakin tinggi tarif pajak sebuah perusahaan, semakin besar manfaat yang diperoleh dari hutang. Tarif pajak merupakan perbandingan antara beban pajak yang dibayar perusahaan (laba sebelum pajak dikurang laba setelah pajak) dengan laba sebelum pajak.

Menurut (Yap, 2016) Tarif Pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan kepada pemerintah, baik secara pribadi maupun badan usaha yang telah terdaftar. Jika kewajiban tersebut dikenakan kepada perusahaan maka akan disebut dengan *corporate tax rate* (tarif pajak perusahaan). Meningkatkan hutang dapat mengurangi beban pajak yang akan ditanggung perusahaan. Salah satu biaya yang bisa dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya bunga pinjaman. Pengurangan ini sangat bernilai bagi perusahaan yang terkena tarif tertinggi. Semakin tinggi tarif pajak maka semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan hutang. Oleh karena itu

perusahaan lebih memilih untuk menambah hutang untuk mendapat modal dibanding menerbitkan saham karena atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa tidak menjadi pengurang pajak.

Dikutip dari laman **Kontan.co.id**, Pada tahun 2019, Pemerintah tengah mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) terhadap badan atau perusahaan. Hal ini dipertimbangkan salah satunya lantaran semakin banyak negara-negara di dunia yang menurunkan tarif pajak perusahaan untuk menarik minat investasi yang semakin besar. Kendati demikian, Direktur *Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo menilai, isu kompetisi tarif pajak dengan negara-negara tetangga maupun negara lainnya tak begitu relevan untuk dijadikan alasan utama pemerintah menurunkan tarif PPh Badan. Sebab, penurunan tarif hanya mungkin dilakukan jika basis pajak dan kepatuhan telah meningkat. Bicara basis pajak, Yustinus berpendapat, pemerintah telah menikmati buah dari program pengampunan pajak alias tax amnesty. Dari program yang digelar pada 2016 lalu tersebut, pemerintah memperoleh perluasan basis data pajak melalui deklarasi harta yang nilainya mencapai Rp 4.856 triliun, terdiri dari deklarasi luar negeri Rp 1.031 triliun dan deklarasi dalam negeri Rp 3.834 triliun. Sementara, soal penerimaan, data per akhir tahun lalu telah menunjukkan adanya perbaikan. Yaitu, penerimaan pajak sanggup tumbuh sekitar 15% di tengah pertumbuhan ekonomi yang terbilang stagnan. Terkait isu kompetisi, Yustinus menilai tarif PPh di Indonesia saat ini masih tergolong

kompetitif di kawasan. Dengan catatan, ini merupakan perbandingan tarif nominal bukan beban pajak yang sebenarnya ditanggung alias *effective tax rate* yang notabene bisa lebih rendah. "Terutama untuk PPh Orang Pribadi, tarif tertinggi kita 30%, sedangkan Vietnam, Thailand, Filipina 37%, China 45%, Korsel 42%," ujar Yustinus dalam cuitannya melalui akun Twitter pribadi yang dibagikan kepada Kontan.co.id, Selasa (22/1). Memang, untuk tarif PPh Badan Indonesia sebesar 25%, lebih tinggi dibanding Singapore, Kamboja, Thailand. Rerata tarif PPh negara OECD sendiri sebesar 23,9%. Namun, Yustinus menunjukkan, dibandingkan negara BRICS yang sebaya dengan Indonesia, tarif PPh Badan di dalam negeri saat ini hanya lebih tinggi dari Rusia yang memiliki tarif 20%. PPh badan Indonesia pun masih sama besar dengan China dan India, bahkan lebih rendah dari Afrika Selatan yang 28,5%. Kemudian, Yustinus mengajak pula untuk membandingkan tarif pajak dengan beberapa negara Eropa Utara (Skandinavia). Tarif PPh Orang Pribadi di Swedia mencapai 61%, Denmark 58%, Finlandia 51%. Sementara negara Eropa lain seperti Prancis mematok tarif 45%, Jerman 47%, dan Turki 35%. "Adagium 'tarif pajak tinggi bikin modal lari dan rakyat malas' tidak terbukti di Eropa Utara. Di sana, tarif pajak tinggi, tax ratio tinggi, produktivitas tinggi. Karena revenue dan spendingnya berkualitas. Pemerintahannya komit pada hak warga negara. Demokratis, aman, bahagia," tutur dia. Oleh karena itu, Yustinus mengingatkan akan penurunan tarif PPh Badan mesti dilakukan dengan memahami konteks sepenuhnya dan tanpa

gegabah. Sebab, penurunan tarif menjadi rendah begitu saja (race to the bottom) dalam situasi dan kondisi perpajakan dalam negeri saat ini hanya akan membuat Indonesia kalah. "Pajak jebol, APBN defisit, investasi dan pertumbuhan enggak bakal naik. Maka motifnya jangan itu. Perbaiki sistem perpajakan secara komprehensif," lanjutnya. Yustinus pun mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan meningkatkan transparansi perpajakan secara bertahap. Khususnya sejak Pembaruan Core Tax System atau Sistem Inti Perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Namun, lebih lanjut, masih ada pekerjaan rumah pemerintah yang menanti yakni terkait perbaikan regulasi perpajakan. Terutama melalui revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU PPh, UU PPN (pajak pertambahan nilai), hingga UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Menurut (Agustina, 2017) Struktur aset merupakan penentuan berapa besar alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi dapat digunakan untuk jaminan akan lebih memilih untuk menggunakan penggunaan hutangnya lebih banyak. Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan diharapkan hasil operasional yang dihasilkan juga semakin besar. Ketika penambahan asset perusahaan diikuti dengan peningkatan hasil akan berakibat pada semakin tinggi kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan.

Menurut (Mulyati, 2016) Aktiva (asset) merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Aktiva perusahaan diperoleh dari hasil kegiatan di masa lampau dan bermanfaat untuk kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Struktur Asset perusahaan memainkan peranan penting dalam menentukan pembiayaan perusahaan yang memiliki aktiva tetap jangka panjang tinggi, karena permintaan akan produk mereka tinggi akan banyak menggunakan utang hipotik jangka panjang. Perusahaan yang mempunyai aktiva tetap jangka panjang maka perusahaan tersebut akan menggunakan pembiayaan utang hipotik jangka panjang dengan harapan aktiva tersebut dapat digunakan untuk menutup utangnya. Sebaliknya perusahaan yang sebagian aktiva yang dimilikinya berupa piutang dan persediaan barangnya yang nilainya sangat tergantung pada kelanggengan tingkat profitabilitas (penjualan) tidak terlalu tergantung pada pembiayaan jangka pendek.

Menurut (Ainiyah, N; Nugroho, T, 2017) Struktur asset (FAR) merupakan pijakan dalam menentukan besaran alokasi dana untuk setiap komponen aktiva. Perusahaan yang mempunyai aset tetap yang besar memiliki kesempatan untuk menggunakannya sebagai jaminan sehingga mereka cenderung memilih untuk menggunakan hutang yang lebih besar. Pengukuran struktur asset lebih banyak menggunakan aset tetap. Karena aset tetap dapat dikatakan sebagai salah satu unsur yang penting dan dibutuhkan perusahaan dalam menghasilkan produk.

Sehingga variabelnya secara umum diukur dengan menghitung total aset tetap yang dibandingkan dengan total aset keseluruhan dalam satuan risiko atau persen.

Menurut (Firdayanti, 2017) Profitabilitas perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasinya akan menggunakan hutang yang relatif kecil. Laba ditahannya yang tinggi sudah memadai membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan.

Menurut (Liyanti, L, 2018) Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas ini diprosikan dengan return on equity (ROE) yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas terhadap pemegang saham.

Menurut (Ratnaningsih, 2016) Profitabilitas Merupakan Kemampuan Asset (ROA) Perusahaan untuk menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa, kebijakan utang mencerminkan besarnya utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, sehingga Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja sehingga kewajiban-kewajiban tersebut dapat dibayar tepat pada waktunya. Tarif pajak adalah penetapan persentase pajak yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Struktur aset adalah penentuan berapa besar

alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan bisa menghasilkan laba.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian ini untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya variabel-variabel tersebut yaitu dengan judul **Pengaruh Tarif pajak, Struktur Aset, Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Hutang merupakan salah satu cara untuk memperoleh dana dari pihak kreditur.
2. Tinggi atau rendahnya tingkat hutang suatu perusahaan berkaitan dengan struktur modal yang mempunyai peran yang cukup penting bagi kelangsungan hidup perusahaan.

3. kebijakan struktur modal mempunyai peran yang cukup penting bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.
4. Kebijakan hutang merupakan salah satu keputusan pendanaan yang sangat penting bagi perusahaan biasanya kebijakan utang lebih aman dari pada menerbitkan saham.
5. Tarif pajak suatu penetapan pajak yang dibuat pemerintah untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar dan dipungut oleh wajib pajak.
6. Struktur Asset yang mana asset tetap dapat dijadikan pertimbangan jaminan oleh kreditor dalam memberi pinjaman.
7. Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan diharapkan hasil operasional yang dihasilkan juga semakin besar.
8. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas pengelolaan aset perusahaan yang merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset.
9. Laba yang besar akan menarik minat investor untuk menanamkan modal dan ikut bekerja sama serta mempermudah kreditor untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan.

### **1.3 Batasan masalah**

Untuk mencapai sasaran dan terarahnya dalam penulisan penelitian ini maka penulis akan membatasi masalah dengan Tarif Pajak, Struktur Aset, Profitabilitas sebagai variabel bebas dan tingkat liabilitas sebagai variabel terikat pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah struktur aset berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah tarif pajak, struktur aset, profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kebijakan hutang dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
6. Apakah struktur aset berpengaruh terhadap kebijakan hutang dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
7. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
8. Apakah tarif pajak, struktur aset, profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
9. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

## **1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Untuk mengetahui pengaruh struktur aset terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, struktur aset, profitabilitas terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
5. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kebijakan hutang dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
6. Untuk mengetahui pengaruh struktur aset terhadap kebijakan hutang dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
7. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan hutang dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

8. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, struktur aset, profitabilitas terhadap kebijakan hutang dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
9. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini. Beberapa pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **1. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi tolok ukur bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan terhadap kebijakan utangnya sehingga memberikan hal yang positif untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan kedepannya.

#### **2. Bagi Akademik**

Penelitian ini dapat berguna sebagai khasanah pustaka dan bahan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap agar dapat menjadi sumber referensi sebagai bahan pemikiran yang bermanfaat dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang akan berkaitan dengan topik ini.